

DAMPAK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN TERHADAP KESADARAN BELA NEGARA MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Dwi Joko Siswanto¹

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
dwijokoakmil@manajemenhan.akmil.ac.id

M. Sigit Saksono²

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
m.Sigitsaksono@manajemenhan.akmil.ac.id

Jarwono³

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
jarwono@manajemenhan.akmil.ac.id

Frangky Silitonga⁴

Politeknik Pariwisata Batam
frangky@btp.ac.id

Titiek Herawati⁵

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
Titiekherawat13i@administrasihan.akmil.ac.id

Sopiin⁶

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
sopiin1971@gmail.com

Felik Leandro⁷

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
felikliandro23@gmail.com

Muhamad Andre Nuralam R⁸

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
nuralamandre@gmail.com

ABSTRAK

Posisi strategis perbatasan Indonesia dalam satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antar negara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi ancaman serius adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Tujuan Penelitian, tujuan penelitian tugas akhir ini untuk mengetahui pengelolaan pembangunan di Kabupaten Belu saat ini. memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi

Keyword: Pengelolaan, Kesadaran bela Negara dan daerah perbatasan.

ABSTRACT

The strategic position of Indonesia's borders on the one hand can be a potential for cooperation between countries, but on the other hand it can be a threat to state defence and security. One form of potential that can turn into a serious threat is that there are still a number of border segments that have not been discussed and agreed with neighbouring countries. The threat can be in the form of aggression, territorial violations, armed rebellion, sabotage, espionage, acts of armed terror, sea and air security threats, and communal conflicts. Research Objectives, the purpose of this final project research is to find out the current management of development in Belu Regency. understand the phenomenon of what is experienced by research subjects such as behaviour, perceptions, actions and others, holistically and by way of description

Keywords: Management, State defence awareness and border areas.



PENDAHULUAN

Masalah perbatasan suatu negara akan memiliki dimensi yang kompleks, karena terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Oleh sebab itu, kawasan perbatasan akan memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar. Arti pentingnya nilai kawasan perbatasan akan semakin terasa pada wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi. Karakteristik ini menyebabkan wilayah perbatasan Indonesia mempunyai tingkat kerawanan yang cukup besar sebagai akibat dari semakin kuatnya ikatan hubungan dan aktivitas lintas batas antar warga (BNPP, 2011:35).

Disamping itu wilayah perbatasan Indonesia juga memendam potensi konflik yang serius. Ini terkait dengan persoalan yang belum tuntasnya pemerintahan Indonesia menyelesaikan persoalan wilayah perbatasan darat dan lautnya dengan beberapa negara tetangganya. Indonesia dan Malaysia misalnya, belum sepakat mengenai batas wilayah laut mereka di sekitar blok Ambalat. Sementara itu, Indonesia dan India juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar, yang secara tradisional didatangi oleh nelayan dari Aceh untuk menangkap ikan. Termasuk ketidakjelasan batas wilayah laut Indonesia dan Australia di laut Timor juga telah menyebabkan berulangnya kejadian kapal-kapal nelayan asal Indonesia ditangkap oleh patroli Laut Australia, karena dianggap melanggar batas laut kontinen negara Kangguru tersebut (Ganewati Wuryandari,2009:81). Dalam kondisi seperti diatas, dapat dikatakan bahwa posisi strategis perbatasan Indonesia dalam satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antar negara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi ancaman serius adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresinya, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal (Buku Putih Pertahanan, 2008:27).

Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat pengelolaan dengan baik dan mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Berbagai persoalan melingkupi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste ini. Selain minimnya pembangunan yang ada, juga sering timbul berbagai konflik atas klaim terhadap suatu wilayah tertentu yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat baik dari Indonesia maupun Timor Leste. Termasuk konflik antar warga baru dengan masyarakat lokal. Akibat dari hal ini, tidak jarang telah menyebabkan kekerasan fisik diantar masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Peristiwa konflik penduduk di perbatasan Indonesia-Timor Leste kembali berulang pada tahun 2012 yang dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (*Custom*), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan. Pada tahun 2013, konflik kembali terjadi dan dipicu oleh pembangunan jalan baru oleh Timor Leste di dekat perbatasan memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) ikut terlibat dalam aksi saling lempar tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan satu anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan. Konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut dapat dikatakan menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pada level negara, klaim pemerintah Timor Leste bahwa wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona netral adalah milik Timor Leste, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

pendudukan wilayah melalui pembuatan kebun serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan gedung imigrasi. Konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste menarik karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Masalah yang biasa muncul di perbatasan-perbatasan tersebut hanya berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal dan jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga. Buramnya potret perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut telah mendorong penulis untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang kini tengah menyelimuti masyarakat perbatasan ke dalam penelitian tugas akhir dengan judul “Dampak Pengelolaan Pembangunan Terhadap Kesadaran Bela Negara Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Belu? dan Bagaimana dampak pengelolaan pembangunan terhadap kesadaran bela negara masyarakat di Kabupaten Belu? Adapun yang menjadi tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut; Untuk mengetahui pengelolaan pembangunan di Kabupaten Belu saat ini dan untuk mengetahui dampak dalam pengelolaan pembangunan terhadap kesadaran bela negara masyarakat di Kabupaten Belu.

Perbatasan Negara Dalam Konsep Hukum Internasional. Menurut Suryo Sakti dalam bukunya yang berjudul “Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional” menyampaikan bahwa pengertian perbatasan dapat di bedakan menjadi 2(dua) yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini saling memiliki makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan di sebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat didalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu kesatuan yang bulat dan saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat. Yohanes Sanak (2011:16-17) sendiri memberikan pengertian perbatasan negara adalah persoalan geopolitik sekaligus persoalan. Perbatasan dipandang sebagai persoalan geopolitik manakala dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas keamanan dan kokohnya pertahanan guna melindungi kedaulatan wilayah negara dari ancaman pihak lain. Akan tetapi perbatasan dipandang pula sebagai persoalan social ketika focus perhatian bukan semata pada aspek geografi atau teritorial melainkan pada manusia, masyarakat dan lingkungan di sekitar perbatasan. Lebih jauh dari itu, Whitterley (1982:101-102), memberikan pengertian *Boundary* sebagai batas wilayah negara atau perbatasan di mana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintahan yang berdaulat. *Frontier* adalah daerah batas wilayah negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan Negara lain, sehingga pengaruh luar karena lokasinya berdekatan dengan Negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara

Kepentingan Nasional dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Jack C. Plano, Roy Olton, 1982:7). Hal ini mengartikan bahwa, kasus politik luar negeri dapat saja merupakan masalah kelangsungan hidup, masalah keamanan, masalah ekonomi,

keamanan ataupun politik suatu negara-bangsa. Masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila penyelesaiannya memerlukan dimensi luar-negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya. Kepentingan nasional di perbatasan negara sangatlah besar sebab wilayah perbatasan cukup berpengaruh terhadap keamanan keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pemerintahan perlu menetapkan dan mengimplementasikan strategi politik yang tepat. Sebelum membahas tentang strategi pengelolaan perbatasan negara, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang makna perbatasan.

Konsep Diplomasi Perbatasan.

Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungannya dengan negara lain. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kepentingan nasional terhadap negara lain bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan, melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu di buat. Brian White menegaskan dengan mengatakan bahwa diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya (Roy, 1999:5). Diplomasi perbatasan (*Border Diplomacy*) merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah negara darat dan laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional (Arif Havas Oegroseno, 2006:13). Diplomasi perbatasan ini mempunyai tiga elemen penting (disarikan dari Arif Havas Oegroseno, 2006:14-15), yaitu :

- a. Dengan persetujuan (*by agreement*): dilakukan melalui negosiasi sebagai sebuah kewajiban hukum yang diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hal ini, perang bukan sebuah opsi.
- b. Berdasarkan hukum internasional : maksudnya, (*Border Diplomacy*) hukum internasional dijadikan sebagai dasar dalam penetapan perbatasan. Hukum internasional ini dapat berupa konvensi-konvensi yang relevan, putusan hakim, putusan arbitrase, dan opinion juris.
- c. Mencapai *equitable result* yaitu hasil penetapan perbatasan akan memberikan dampak *just, impartial, and fair*.

Nilai Bela Negara

Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara (Basrie, 1998:8). Nasionalisme adalah tekad atau semangat dari setiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankan bangsa dan negaranya agar selalu meningkat rasa kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya serta terjamin kedaulatannya (Hardjosatoto, 1985:42).

Ipolesosbud Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum itu. Posisi Detis Juris, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Di dalam hukum nasional, cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 25A UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang". Ketentuan UUD 1945 ini sejalan dengan UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Hal tersebut menegaskan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian mendapat pengakuan dunia internasional.

Sebagai negara kepulauan, maka akan menyebabkan Indonesia secara geografis Indonesia terletak pada lokasi yang strategis yaitu berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Disisi lainnya

Indonesia juga akan berbatasan dengan negara lain baik darat maupun laut. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki peluang dari posisi strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. Namun dalam posisi ini juga akan memberikan ancaman yang besar bagi Indonesia terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan baik dilihat dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan (Ganewati, 2012:45). Dengan demikian, pengelolaan perbatasan dalam berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung kedaulatan NKRI. Semua pengelolaan perbatasan dalam berbagai bidang tersebut seperti yang dijabarkan oleh Hermen batu Bara (2013:71-82) dalam bukunya yang berjudul Cinta Diujung Negeri Menjaga Kedaulatan Negeri sebagai berikut :

Ideologi

Dalam pengelolaan perbatasan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai instrinsik, Beberapa persoalan sosial budaya yang penting dalam analisis perbatasan antara lain adalah pemaknaan sosial budaya, pemaknaan sosial agama, pemahaman relasi-relasi sosial, pemaknaan sosial agama, pemahaman relasi-relasi sosial, pemahaman sosial ekonomi, dan pemahaman sosio-geo politik internasional. Dalam kondisi ini, pembinaan ideologi Pancasila diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi tumbuhnya ketangguhan ideologi nasional dalam rangka mewujudkan semangat kebangsaan masyarakat, seperti hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian baik sesama warga, antar suku maupun agama. Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang masih rendah, rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh karenanya pemantapan nilai-nilai ideologi Pancasila perlu dipelihara dan ditingkatkan, sehingga kecintaannya pada negara dan tanah air tumbuh dan berkembang untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Politik.

Strategi politik dalam pengelolaan perbatasan dapat dipahami sebagai jalan atau cara yang digunakan untuk mencapai sasaran politik tertentu. Strategi politik dalam pengelolaan perbatasan menjadi penting untuk melakukan perubahan bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah perbatasan. Dalam kondisi ini ada dua pola yang digunakan yaitu pola SWOT (*strength, weakness, opportunities* dan *threats*) dan pola perencanaan konsepsional. Pola swot membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi sedangkan pola perencanaan konsepsional berlanjut pada implementasi dan evaluasi strategi. Titik tekan pada pola tersebut adalah perlunya analisa kekuatan dan kelemahan sasaran untuk mengidentifikasi dan menganalisa lingkungan sekitar daerah perbatasan yang kemudian diikuti dengan pertimbangan rasional untuk memberikan solusi dalam rangka memenangkan tujuan politik secara efisien dan efektif. Selanjutnya dijelaskan adanya dua jenis strategi politik yaitu strategi menyerang (*ofensif*) dan strategi bertahan (*defensive*). Strategi ofensif adalah sikap agresifitas dan pro aktif menjemput bola sebelum pihak lawan menyerang. Sementara strategi defensive dilakukan dengan tujuan untuk bertahan dan menangkal serangan lawan. Dalam pengelolaan perbatasan negara, untuk mewujudkan kepentingan politik nasional di wilayah perbatasan negara, pemerintah pemerintah perlu menerapkan strategi yang cukup kuat. Dalam kondisi ini ada tiga strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola perbatasan negara yaitu yang mengedepankan *state security, human security* serta perpaduan diantara keduanya.

Pertama *human security* sebagai salah satu pilihan cara atau jalan yang dapat diterapkan dalam mengelola perbatasan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek seperti tingkat penghasilan, pengetahuan, dan derajat kesehatan masyarakat yang memadai. Dalam kondisi ini diperlukan tindakan nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam berbagai bidang. Layak tidaknya tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perbatasan turut memberikan andil yang cukup signifikan terhadap upaya menjaga keamanan negara.

Kedua strategi yang ditetapkan oleh pemerintahan untuk mengelola perbatasan *state security* yaitu mengamankan wilayah dengan mengerahkan dan memperkuat pasukan militer untuk menjaga wilayah perbatasan dari berbagai infiltrasi, ancaman dan gangguan dari berbagai pihak.

Ketiga strategi gabungan antara *state security* dan *human security* yaitu dalam mengamankan dan menjaga kedaulatan negara dilakukan tidak saja tidak saja menerapkan pengerahan pasukan militer tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintahan Indonesia seyogyanya tidak hanya mengutamakan keamanan teritorial dengan negara akan kekuatan militer untuk menjaga perbatasan, tetapi juga perlu juga melakukan pembangunan kesejahteraan di perbatasan secara memadai. Pilihan strategi politik inilah yang kemudian yang menempatkan perbatasan sebagai halaman depan negara.

- a. **Ekonomi.** Dalam bidang ekonomi, permasalahan yang muncul di daerah perbatasan Indonesia adalah pendapatan masyarakat yang relatif rendah, minimnya infrastruktur sosial ekonomi, karena kegiatan yang ada hanya berskala lokal, bersifat parsial dan kurang terkoordinasi berimplikasi pada rendahnya mutu pembangunan dan manusia.
- d. **Sosial Dan Budaya.** Dalam bidang sosial budaya dalam pengelolaan perbatasan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun sosial budaya masyarakat perbatasan, agar memiliki nilai-nilai budaya bangsa untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertahanan Dan Keamanan. Pengelolaan perbatasan dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah upaya mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman baik yang ada di darat maupun laut. Berbagai permasalahan perbatasan di Indonesia yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan antara lain adalah permasalahan pelanggaran batas negara baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA, penyelesaian penetapan batas negara yang belum jelas terutama laut, ancaman isu *transnational crime* seperti teroris dan pembajakan, pencurian sumber kekayaan alam, penyelundupan barang, narkoba dan orang (*illegal drugs and people trafficking*), Di perbatasan darat khususnya adanya kerbatasan jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS) dan lain sebagainya. Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah Indonesia melakukan penguatan keamanan dan kerjasama keamanan. Negara-negara yang berbatasan telah menunjukkan upaya *cooperative security* di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, adalah kerjasama yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia; keinginan Singapura dalam mendorong terbentuknya RMSI (*Regional Maritime and Security Initiative*) yang dimotori oleh USPACOM (*US Pasific Command*) guna mengatasi isu kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat Malaka dan sekitarnya. Disamping itu perlu dilakukan ketersediaan sarana dan prasarana Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) yang memadai. Hal ini disebabkan adanya sarana dan prasarana perbatasan yang memadai akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal.

Dasar pemikiran Pengelolaan Perbatasan

Rekomendasi Pengelolaan Perbatasan di Indonesia menyampaikan tentang dasar pemikiran adanya pengelolaan daerah perbatasan adalah sebagai berikut:

UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, antara lain mengamanatkan bahwa:

- 1) Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.
- 2) Pelaksanaan kewenangan badan pengelola diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Badan pengelola di tingkat nasional bertugas: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- 4) Adanya hubungan kerja antara badan pengelola nasional dan badan pengelola di daerah yang bersifat koordinatif dan pembinaan teknis fungsional.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) yang berfungsi untuk memantapkan konsep arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan dalam waktu yang singkat, dan dapat didukung dan didorong oleh lembaga non pemerintah.

METOLOGI PENELITIAN

Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Lexy Moleong (2001: 3) adalah sebagai berikut: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Agar penelitian yang dilakukan berjalan efektif maka hal yang penting harus diperhatikan dalam melakukan penelitian adalah menentukan batasan lokasi penelitian. Untuk meneliti langsung di daerah sasaran penelitian yaitu di Kabupaten Belu. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik semua fenomena yaitu yang disebut variabel penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2002:43). Berkaitan dengan instrumen penelitian kualitatif maka Lexy Moleong (2001:3) memberikan pendapatnya sebagai berikut: Dalam penelitian kualitatif maka peneliti adalah sebagai instrument kuncinya yaitu peneliti sendiri yang menentukan keseluruhan skenario penelitian, serta langsung turun ke lapangan melakukan wawancara dengan informan artinya peneliti akan memposisikan diri sebagai pencari dan pengumpul data.

Sampel sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh (Suharsimi Ari Kunto, 2002:107). Jadi sampel sumber data menunjukkan asal informasi dan harus diperoleh dari sumber yang tepat sehingga apabila tidak tepat maka data yang diperoleh tidak relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subyek yang merupakan sumber darimana data tersebut di dapatkan dalam dua jenis adalah sebagai berikut : Data Primer yaitu diperoleh dari nara sumber langsung yang berkaitan atau yang mengetahui tentang pengelolaan perbatasan Kabupaten Belu. Dengan demikian, data primer dalam penelitian dengan wawancara dengan nara sumber yang mengetahui pengelolaan perbatasan Timor Timur Utara. Data sekunder yaitu diperoleh dari studi dokumentasi antara lain sebagai berikut :

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan antara lain

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.,
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.,
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan keduanya (Herdiansyah, 2010:143). Dalam penelitian tugas akhir ini penulis mengambil data dalam tiga cara yaitu:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Kepustakaan

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti peraturan,



hasil laporan dan lain sebagainya.. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan dapat membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain (Miles dan Huberman, 1992:19).

PEMBAHASAN

Secara sederhana, perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus punya fungsi strategis bagi suatu negara. Oleh karenanya, pengelolaan perbatasan akan menjadi faktor penting dalam upaya mempertahankan kedaulatan suatu negara dan memupuk rasa nasionalisme masyarakat perbatasan (Ganewati Wuryandari,2009:691). Dalam kondisi ini, pengelolaan pembangunan perbatasan dan pembentukan kesadaran bela negara akan mempunyai peran penting dalam upaya melindungi negara dari segala macam bentuk ancaman guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bob Sugeng (2009:154-159) dalam bukunya yang berjudul *Persoalan Rezim, Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste* yang menyampaikan pendapat: bahwa pengelolaan pembangunan perbatasan akan sangat mempengaruhi rasa bela negara yang kuat dari masyarakat perbatasan. Hal ini berarti semakin optimal pengelolaan perbatasan yang dilakukan pemerintah maka secara otomatis akan memperbesar kesadaran bela negara dan sebaliknya minimnya pengelolaan perbatasan akan memicu lunturnya kesadaran bela negara dalam bentuk munculnya berbagai konflik sosial, penyelundupan dan sebagainya.

Bidang Ideologi

Dalam pengelolaan perbatasan, maka Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai intrinsik telah disepakati secara nasional sebagai ideologi, yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia karena mempunyai peran dan fungsi sebagai perekat (*adhesive function*). Dalam kondisi ini, pembinaan ideologi Pancasila diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi tumbuhnya ketangguhan ideologi nasional dalam rangka mewujudkan semangat kebangsaan masyarakat, seperti hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian baik sesama warga, antar suku maupun agama. Untuk melihat gambaran pengelolaan pembangunan perbatasan di Kabupaten Belu di bidang ideologi, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Joash Tapiheru, S.Ip, MA seorang dosen sekaligus peneliti daerah perbatasan Indonesia dari UGM Yogyakarta, pada seminar Manajemen Pertahanan Kordos Akmil pada tanggal 21 april 2023 bertempat Gedung lily Rohily menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Untuk melihat pembangunan ideologi di Kabupaten Belu dan semua perbatasan Indonesia-Timor Leste akan lebih baik bila melihatnya secara utuh baik dari sisi sejarah, ekonomi, geografis, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sebab diantara berbagai bidang tersebut saling berkaitan, artinya pembangunan ideologi saja tidak cukup ketika pembangunan di bidang lain seperti ekonomi dan sosial budaya tidak diperhatikan. Harus diakui bahwa pemaknaan Pancasila belum optimal disebabkan nasionalisme semakin meluntur seiring dengan tidak optimalnya pengelolaan pembangunan di perbatasan yang ditandai dengan masih maraknya konflik horisontal dan penyelundupan serta KTP dobel.

Untuk melihat belum optimalnya pembangunan di bidang ideologi masyarakat di Kabupaten Belu, maka berikut ini adalah data tentang hasil penelitian dari tim Universitas Gajah Mada tentang kesimpulan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dari beberapa item pertanyaan di 12 Kecamatan Kabupaten Belu pada Tahun 2012 sebagai berikut: Berpijak dari kedua wawancara dan data penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembangunan di bidang ideologi khususnya pemahaman tentang Pancasila di Kabupaten Belu belum optimal . Dalam 12 Kecamatan yang ada hampir sebagian besar yaitu lebih dari 50% menyampaikan tidak mengerti tentang Pancasila. Hanya di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Raihat saja yang kurang dari 50% yaitu 32,8 % dan 46.5%

Bidang Politik



Seperti yang disebutkan di dalam Bab II sebelumnya bahwa di bidang politik, pengelolaan pembangunan perbatasan dapat dilakukan dalam tiga hal yaitu *state security*, yaitu yang mengutamakan pendekatan keamanan, *human security* yaitu mengutamakan kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan terakhir adalah pendekatan komprehensif yaitu dengan menggabungkan *state security* dan *human security*. Dengan demikian, gambaran umum Kabupaten Belu bila dilihat dari kualitas hidup SDM dan pengelolaan keamanan dapat dijadikan acuan untuk melihat pengelolaan pembangunan perbatasan Kabupaten Belu sebagai berikut :

Kondisi Geografis, Topografis Dan Geologis

Kabupaten Belu merupakan wilayah yang ada di Propinsi Nusa Tenggara (NTT) dengan luas 2445,57 km dan terletak pada kordinat 124°-126° Lintang Selatan. Secara geografis wilayahnya juga yang paling banyak berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:Selat Ombai
Sebelah Selatan	:Laut Timor
Sebelah Timur	:Timor Leste
Sebelah Barat	:Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS

Luas wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke Utara dan Selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Wilayah datar terletak di bagian Selatan memanjang sampai tenggara pada pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2 % , sedangkan daerah datar berombak sampai bergelombang 3% -40% hampir merata di seluruh wilayah yaitu mencapai 55,86% dari luas wilayah. Wilayah pegunungan < 40% terdapat di wilayah tengah ke arah timur dengan luas wilayah sekitar 17,40% Kabupaten Belu memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember-Maret) dan musim kemarau yang panjang (April-November) menyebabkan kekeringan. Sementara, Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6 °c dengan interval suhu 21,5°c - 33,7°C. Temperatur terendah 21,5°C terjadi pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi 33,7°C (terjadi pada bulan Oktober-November).

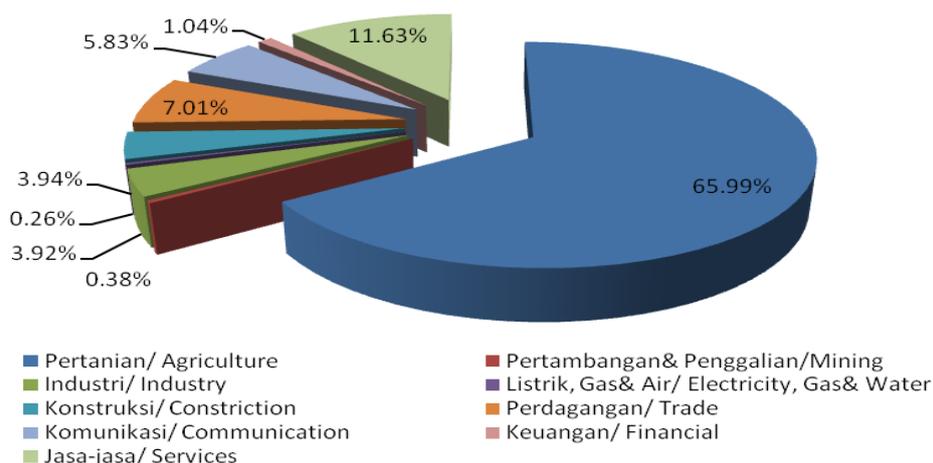
Kondisi Demografis.

Kondisi demografis Kabupaten Belu dapat ditelusuri dari jumlah kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan penduduk yang dapat dilihat kepadatan penduduk tertinggi ada pada kecamatan Atambua Selatan yaitu 1.487 Jiwa/Km² , Kecamatan Atambua Barat 1.485 Jiwa/Km² dan kecamatan Kota Atambua 1.283,21 Jiwa/Km² . Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah ada pada kecamatan Lamaknen Selatan yaitu 75 Jiwa/Km² dan kecamatan Nanaet Duabesi yaitu 23 Jiwa/Km². Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, kepadatan pendudukan tidak merata. Hal tersebut dapat menjadi ancaman yang berbahaya karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dan pemerataan wilayah yang menyebabkan mendapat pengaruh dari pihak lain.

Data di atas menunjukkan betapa rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di perbatasan. Rata-rata tingkat kemiskinan pada 12 (dua belas) kecamatan lebih dari 50%. Seperti di kecamatan Lamaknen Selatan angka kemiskinan mencapai 53,6%, kecamatan Nanaet Dubesi sebesar 55,7%, kecamatan Lasiolat sebesar 51,9% penduduk yang tergolong miskin. Untuk selanjutnya dalam data yang dikeluarkan BPS kabupaten Belu juga memberikan informasi tentang kemiskinan berdasarkan rumah yang ditempati dan dapat dilihat data di atas yaitu sebanyak 25.686 dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten Belu tergolong fakir miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Bahkan di kecamatan Nanaet Dubesi, Atambua Barat. Tasifeto Timur, Raihat memiliki penduduk fakir miskin 100% menempati rumah tidak layak huni yaitu rumah tidak permanen pada umumnya adalah rumah tradisional atau rumah bulat (*ume bubu*) dan rumah tradisional yang sedikit mengalami modifikasi bentuk yakni berbentuk persegi dan terdiri dari beberapa kamar. Jenis rumah ini atapnya terbuat dari alang-alang, konstruksinya terbuat dari kayu ,dindingnya terbuat dari papan atau bambu dan berlantai tanah. Data yang mengindikasikan

bahwa tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat perbatasan masih rendah yakni berpendidikan SD. Bahkan masih banyak yang tidak tamat SD dan tidak bersekolah. Walaupun sudah banyak yang tamat dari perguruan tinggi. Pada kecamatan Lasiolat dan Nanaet Dubesi penduduknya yang paling banyak tidak bersekolah dan tidak tamat SD yaitu lebih dari 50% dari total seluruh penduduknya. Dalam data BPS Kabupaten Belu 2014 juga menginformasikan bahwa penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin yaitu yang tidak pernah sekolah atau putus sekolah sebelum menamatkan pendidikan SD.

Diagram 1
Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha



Dari diagram diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Belu mempunyai pekerjaan di bidang pertanian tradisional yaitu tidak mau menggunakan teknologi, hanya untuk memenuhi hidup petani dan masih berpangku pada alam. Lahan pertaniannya adalah lahan kering berupa jagung, padi huma, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Pola pertanian lahan kering ini dilakukan secara berpindah-pindah dengan cara tebas bakar hutan. Cara ini dilakukan karena kondisi tanah yang kurang subur (Yohanes Sanak (2012:47)

Pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik Hal ini jelas terlihat dari seluruh jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga medis sudah ada dari tiap daerah. Namun dalam penelitian Yohanes Sanak (2012:179) menyebutkan bahwa kondisi tingkat kesehatan masyarakat Belu masih memprihatinkan. Hal ini lebih disebabkan masyarakat yang masih percaya kepada dukun atau orang pintar untuk mengobati penyakit. Disamping juga. Minimnya kesehatan disebabkan langkanya air bersih, dapur yang masih kotor dan penggunaan kayu bakar dalam memasak. Berkaitan dengan tingkat kesehatan, bapak Joash Tapiheru, S.Ip,MA seorang dosen sekaligus peneliti daerah perbatasan Indonesia dari UGM Yogyakarta, pada identifikasi ulang pada seminar Prodi manhan yang bertempat di Lily Roheli yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Fasilitas kesehatan meliputi Rumah sakit, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesde) berikut dokter-dokter, tenaga medis dan personel pendukungnya telah disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa perumahan atau kamp-kamp warga baru banyak tidak layak huni karena tidak ketersedianya sarana air bersih, sarana dapur yang masih sederhana dan masih menggunakan kayu bakar. Saluran listrik belum tersedia, sehingga masyarakat menggunakan penerangan minyak tanah.

Untuk selanjutnya, dalam melihat pengelolaan pembangunan di bidang politik di perbatasan Kabupaten Belu, maka penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Joash Tapiheru,Slp,MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia, pada identifikasi ulang pada seminar Prodi manhan yang bertempat di Lily Roheli yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Saya melihat dari hasil penelitian yang saya lakukan di wilayah perbatasan Indonesia –Timor Leste. Termasuk di kabupaten Belu bahwa adanya dominasi strategi state security yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Belu dalam mengelola perbatasan.dan ini masih mewarnai pengeloaan seluruh perbatasan di Indonesia. Menguatnya ini sekaligus menjelaskan melemahnya strategi human security yang di indikasikan oleh orientasi kepada kesejahteraan

masyarakat perbatasan. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat perbatasan terpinggirkan dan mengalami keterbatasan kualitas hidup.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa, dalam penelitian yang saya lakukan, bahwa penggunaan TNI di perbatasan di Kabupaten Belu lebih disebabkan adanya kaburnya wilayah perbatasan yang hingga kini masih belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste termasuk antara Kabupaten Belu dengan Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) sehingga ditetapkan zona netral yang tidak boleh dipakai oleh kedua negara. Ternyata ini seringkali memicu konflik antara lain perebutan lahan pertanian dan lahan ternak untuk digembala, pergeseran Patok. Terbaikannya *human security* pengelolaan perbatasan di Kabupaten Belu menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbatasan ekonomi, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Belu adalah pengelolaan perbatasan secara komprehensif sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat menjadi solusi untuk mengeliminir konflik sehingga terciptanya stabilitas keamanan dan terdugungnya kedaulatan NKRI

Memang di Kabupaten Belu kondisi kesejahteraan masyarakatnya masih terbatas bila dilihat dari pendidikan, bentuk rumah yang ada, keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, TNI disana tidak hanya tidak hanya menyelesaikan permasalahan keamanan seperti penyelundupan dan konflik horisontal. tetapi TNI juga membantu masyarakat bertani dengan menggunakan pupuk, mengajari pola hidup disiplin, membuat rumah layak huni dsb.

Bidang Sosial Budaya

Pengelolaan pembangunan di kawasan perbatasan dalam bidang sosial budaya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun sosial budaya masyarakat perbatasan, agar memiliki nilai-nilai budaya bangsa untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi Pembangunan Di kawasan Perbatasan menyampaikan bahwa kondisi sosial budaya dapat dilacak dari latar belakang sejarah, adat dan asal usul dari masyarakat yang menempati kawasan perbatasan itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul *Human Security dan Politik Perbatasan*, Yohanes Sanak (2012:35-39) menyampaikan bahwa secara umum di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dapat dilacak dari sejarah panjang mulai dari zaman kerajaan, masa penjajahan, zaman integrasi sampai pasca referendum yang dapat dijadikan patokan untuk melaksanakan pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Termasuk di Kabupaten Belu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Zaman Kerajaan

Sejarah perbatasan pada zaman kerajaan dimulai dari kesepakatan lisan para raja di wilayah tengah hingga Barat pulau Timor yang di kordinir oleh Sonbai sebagai raja terbesar dan dituakan diantara raj-rajanya lainnya. Para raja di Timor Barat menyepakati batas antar kerajaan sebagian besar menggunakan batas alam yaitu sungai, gunung dan bukit. Kesepakatan batas ini kemudian diikuti dengan upacara ritual adat hingga semua pihak mentaatinya. Ritual ini ditindak lanjuti oleh masing-masing kerajaan untuk mengontrol batas kedaulatannya dengan upacara adat yang disebut upacara non pah yaitu ritual adat yang dilakukan oleh setiap kerajaan untuk memastikan batas kerajaannya dalam keadaan aman. Dengan demikian tidak ada permasalahan tapal batas antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya.

Zaman Kolonial

Berdasarkan kesepakatan antara Belanda dan Portugis, menyebabkan perbatasan antar kerajaan kemudian mengalami perubahan menjadi perbatasan antara Timor bagian Barat (yang dikuasai Belanda) dan Timor bagian Timur (yang dikuasai Portugis) . Perjanjian batas yang dilakukan dilandasi oleh menguatnya kepentingan perebutan penguasaan kayu cendana sebagai dagangan yang cukup laris, Namun demikian kesepakatan batas wilayah yang dibuat oleh Belanda dan Portugis terus berubah karena kedua negara tersebut selalu berupaya untuk terus memperluas wilayah kekuasaan dengan menghasut dan memanfaatkan rakyat jajahannya untuk mewujudkan ambisi ekonomi keduanya. Demikian seterusnya kesepakatan akan batas wilayah terus dilanggar oleh kedua negara tersebut karena benturan kepentingan agar dapat meningkatkan eksploitasi kayu cendana. Belanda dan Portugis terus berupaya menggeser patok batas yang telah disepakati.



Zaman Integrasi

Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur secara resmi berintegrasi ke wilayah Indonesia sebagai provinsi termuda. Batas yang digunakan saat itu adalah batas lama. Akan tetapi ada desakan warga Ambeno kepada pemerintah daerah setempat agar diperbolehkan menggarap lahan di lokasi konflik sebelumnya. Karena itu, pada tahun 1988, Tim TNI-AD, Kepolisian dan BPN melakukan pemasangan pilar batas yang baru sebagai tanda batas administratif antara Provinsi Timor Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasca Referendum

Pasca referendum 1999, Timor Leste kemudian lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai sebuah negara merdeka setelah mayoritas penduduk negeri itu memilih opsi merdeka yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Sambil menanti peresmiannya sebagai negara merdeka, PBB mengirim UNTAET (*United Traditional Administration for East Timor*) sebagai pengendali administrasi pemerintahan transisi Timor Timur

Asal Usul Masyarakat.

Secara historis, daratan Timor terbagi tiga daerah otonom, yaitu: otonom Likusai, yang akhirnya dikuasai oleh Porto; otonomi Wewiku Wahela yang mencakup daerah Belu; dan otonomi Sonbae dari so'e sampai di Mimi. Hal ini diperjelas secara komprehensif oleh Johannes Bernando Seran, seorang akademisi dan tokoh budaya local. Menurut seran, ketiga orang bersaudara dari tanah Malaka yang menjadi cikal bakal masyarakat Belu adalah Nekin Mataus (Likussen), Saku Matuas (Sonbae), dan Bara Mataus (Fatuaruin).

Masyarakat dan Hukum Adat

Kelompok etnik yang dominan di Kabupaten Belu adalah suku Tetun (Belu), Dawan (Attoin Metto), Bunak (Marae) dan Kemak. Kelompok etnik ini dibagi lagi menjadi kelompok atau sub kelompok etnik yang lebih kecil. Di areal Lahurus (Kecamatan Lasiolat), suku Leoklaren merupakan sub etnik yang dominan, kemudian juga Astalin dan Leowes. Di Kecamatan Tasifeto Timur, suku Kemak dan Tetun cukup dominan, diikuti oleh suku Leowes dan Meumetan.

Budaya penyebab rendahnya kehidupan masyarakat.

Penyebab kemiskinan. Faktor penyebab lainnya adalah tradisi masyarakat setempat yang kurang kondusif bagi pengembangan ekonominya. Terkait dengan kemiskinan kultural dan minimnya sumber daya alam, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan masyarakat setempat sebab pemerintah mestinya hadir di sana untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat. Rendahnya *governability* menjadi bagian dari kemiskinan tersebut, sebab kebijakan dari pemerintah yang berkapasitas baik akan mampu menjawab problema kemiskinan masyarakat sekalipun hal tersebut harus berhadapan dengan persoalan kultural maupun rendahnya sumber daya alam. Sementara itu, dari hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan pengelolaan pembangunan sosial budaya di Kabupaten Belu, dengan bapak Joash Tapiheru,Slp,MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia, pada tanggal 21 April 2024 pada seminar Prodi Manhan Kordos akmil yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Perbatasan Indonesia-Timor Leste tergolong sangat unik, termasuk di Kabupaten Belu karena masih keturunan dalam suku yang sama. Dari aspek sosial budaya, antara warga di kabupaten Belu dan warga Timor Leste yang tinggal di kawasan perbatasan memiliki banyak kesamaan baik dalam cara berpakaian,bahasa dan ritual . Dengan demikian batas geografis tidak dapat menjadi batas sosial dan kultur. Untuk itu, pengelolaan perbatasan kedua negara perlu memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat agar hubungan kekerabatan yang ada tidak terganngu.

Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Sejak tahun 2002, seluruh Pemerintah Daerah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste termasuk di Kabupaten Belu telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah dan kepentingan umum di perbatasan negara yaitu untuk pembangunan pos Satgas Pamtas TNI, Pos Brimob, pos Polisi, rumah jaga, kantor bea dan cukai, imigrasi, karantina, gapura perbatasan dan lain sebagainya. Linmas perbatasan ini dirancang sebagai aparat pemerintah daerah yang berfungsi membantu aparat perbatasan untuk mengamankan perbatasan dari segala bentuk ancaman dan melaporkan setiap kejadian di perbatasan, Termasuk punya fungsi untuk mengatasi semua kejadian illegal.



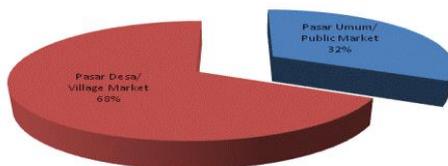
Guna melengkapi data dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Joash Tapiheru,Slp,MA yang bekerja sebagai dosen dan peneliti kawasan perbatasan di Indoneia yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Upaya pembangunan untuk kepentingan pengamanan dan pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Belu tersebut menegaskan kembali bahwa perbatasan masih dianggap sebagai wilayah khusus yang cukup berbahaya sehingga memerlukan pengawasan pengamanan yang ketat. Padahal pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat penting sebagai pondasi bela negara dan kedaulatan NKRI di perbatasan.

Bidang Ekonomi

Laju Pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan diindikasikan oleh beberapa hal yang mempengaruhinya yakni ketersediaan fasilitas ekonomi seperti pembangunan dan pemanfaatan pasar, penumbuhan koperasi, UKM dan bank sebagai lembaga keuangan, dukungan kebijakan daerah dan alokasi anggaran untuk membangun wilayah perbatasan, ketersediaan infrastruktur transportasi, komunikasi dan listrik yang memadai. Sementara itu, Yohanes Sanak (2012:67) menyebutkan bahwa keadaan perekonomian di Kabupaten Belu dapat dilihat dari sektor kegiatan usaha ekonomi yang menghasilkan barang-barang atau jasa yang secara total membentuk Produk Domestik Regional Bruto. Dilihat dari struktur perekonomian di Kabupaten Belu maka masih berada dalam struktur ekonomi primer, karena sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sebesar 44,93% sampai tahun 2014 disusul jasa (19,28%), perdagangan, restoran dan hotel, (18,31%), pengangkutan dan komunikasi (8,3%), bangunan (4,91%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (3,98%), industri pengolahan (2,03%), pertambangan dan penggalian (1,70%), listrik, gas dan air bersih (0,36%)

Garafik 3
Jumlah Pasar Tahun 2014



Keterangan :  : Pasar Umum
 : Pasar Desa/Tradsional

Kondisi perekonomian yang demikian tidak terlepas dari infra struktur yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Belu seperti kondisi jalan yang jg masih banyak rusak , jumlah pasar yang ada juga sebagian besar masih pasar desa dan tradisional yaitu hanya buka pada hari tertentu dan dilakukan dengan jual beli tanpa ada penataan dan manajemen yang modern. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila pendapatan perkapita Kabupaten Belu seperti yang dikeluarkan dari data BPS masih tergolong rendah yaitu 646.235 paer tahun dan nasional sebesar 2,75 juta. Dengan pendapatan yang demikian jika dikonversi kedalam jumlah bulan dan hari, maka rata-rata penghasilan masyarakat per bulan sebesar Rp 538.529 atau penghasilan per hari hanya mencapai Rp 17.950.

Dampak Pengelolaan Pembangunan Terhadap Kesadaran Bela Negara Masyarakat Di Kabupaten Belu. Posisi wilayah perbatasan di Kabupaten Belu sebagai salah satu garda terdepan Indonesia dengan negara lain menyebabkan keikut sertaan masyarakat perbatasan Belu dalam bela negara yang kuat dirasakan perlu untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mengingat dua diantara dari banyak fungsi dari perbatasan adalah untuk mencapai kepentingan nasional dan untuk persatuan nasional. Kesadaran bela negara yang baik dari suatu masyarakat terlihat dari indicator, Disadari bahwa agar kemauan kesadaran bela negara itu tumbuh di masyarakat perbatasan, sangat dibutuhkan pengelolaan pembangunan perbatasan dengan pendekatan

keamanan, kesejahteraan dan melestarikan lingkungan mereka, namun pada saat ini begitu banyak permasalahan yang dihadapi warga masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk melihat permasalahan tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Joash Tapiheru, SIp, MA yang menyampaikan pendapatnya

Secara umum permasalahan perbatasan di Kabupaten Belu juga sama seperti yang dialami oleh perbatasan Indonesia lainnya seperti kemiskinan, kaburnya batas wilayah, kurangnya akses transportasi, listrik dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, kualitas hidup rendah dan pelanggaran batas. Untuk Belu yang membedakan dengan lainnya adalah adanya tanah ulayat karena antara Timor Leste dan Belu berasal dari nenek moyang yang sama sehingga punya budaya yang sama.

berbagai permasalahan, penyebab dan dampak bela negara di Kabupaten Belu di atas diuraikan sebagai berikut:

Kemiskinan.

Kemiskinan yang melanda masyarakat perbatasan disebabkan oleh beberapa hal yakni rendahnya kapasitas governability para pengambil kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan, factor kultur masyarakat yang kental di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya. Di bidang pendidikan kultur yang sangat kental ialah terdapat suatu kebiasaan yang kurang kondusif terhadap kemajuan pendidikan yakni mempekerjakan anak usia sekolah untuk membantu orang tua mencari nafkah.

Batas wilayah yang belum jelas dan Akses infrastruktur yang terbatas. Banyak factor yang menyebabkan batas wilayah yang belum jelas. Dilihat dari sejarahnya persoalan yang muncul adalah dari segi kultural yaitu ketika mulai zaman kerajaan sampai zaman referendum permasalahan tentang tapal batas tersebut sudah ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian traktat tetapi hal tersebut tidak menjadi pedoman oleh masyarakat yang berada di sekitar perbatasan karena mereka beranggapan sudah memiliki batas-batas yang sudah ditentukan oleh para leluhurnya. Sehingga dari hal tersebut di tentukan adanya daerah netral agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang tapal batas antar negara. Tetapi yang terjadi daerah tersebut digunakan untuk perebutan antara kedua belah masyarakat perbatasan. Dari hasil wawancara seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Belu antara lain, kemiskinan, disparitas harga, adanya tanah adat yang menyebabkan kaburnya batas wilayah. Sementara penyebabnya adalah kurangnya komitmen dan kordinasi dari para stake holder, pengaruh budaya lokal, paradigma lama pembangunan dan faktor alam. Kondisi perbatasan dan masyarakat Kabupaten Belu yang buruk akan berdampak pada rendahnya kesadaran bela negara yang terlihat dari munculnya konflik horisontal, penyelundupan dan illegal.

PENUTUP

1. Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.
2. Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Bobonaro misalnya, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat

di wilayah NTT. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

3. Rendahnya kualitas SDM. Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.
4. Adanya aktivitas pelintas batas tradisional. Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di beberapa daerah seperti di Timor Leste.
5. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat. Di beberapa kawasan perbatasan terdapat tanah adat/ulayat yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antarnegara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Keberadaan tanah ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan, secara astronomis memerlukan pengaturan tersendiri serta dapat menjadi permasalahan di kemudian hari jika tidak ditangani secara serius.

SARAN.

Dalam hal terjadinya sengketa batas wilayah negara, diharapkan negara negara dapat mematuhi ketentuan hukum internasional dalam bentuk negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian secara damai. Hal ini penting disebabkan adanya berbagai perkembangan baru baik dalam dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi yang dapat menimbulkan berbagai kepentingan apakah itu soal politik, ekonomi maupun sosial yang dapat menjurus ke arah pertikaian. Pertikaian-pertikaian demikian bahkan dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia, sehingga disinilah pentingnya penyelesaian sengketa harus dilaksanakan secara damai. Mengingat bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) dapat dianggap sebagai simbol kesejahteraan negara, sehingga diharapkan bahwa dalam menjaga perbatasannya kedua negara mempunyai peran masing masing, walaupun dalam penentuan batas wilayah darat kedua negara masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya, baik negara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan perosoalan penetapan batas wilayah masing-masing harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk mencapai titik temu dan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Belum lagi ditambah dengan kewenangan pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan perbatasan terkhususnya penyelesaian konflik perbatasan yang dianggap warga sebagai proyek. Belum efektif serta belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut 87 kelembagaan, program maupun kejelasan wewenang berimplikasi pada pemberdayaan kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Ahmad Rustandi, Z. A. (1988). Tata Negara Jilid 2.
Ahmadi, A. (2007). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Aleksius, J. (2008). Politik Global Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ambarwati, S. W. (2016). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jawa Timur: Intrans Publishing.



Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana. BNPP. (2011). Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Jakarta: Republik Indonesia.
BNPP. (2018). Informasi Umum tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jakarta: BNPP.

